

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindungan Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja tahun sebelumnya, isu-isu penting/strategis terkini. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan awal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2025 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di bidang Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 kami susun, semoga dapat menjadi pedoman dalam melakukan Kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2025.

Pangkalan Bun, Agustus 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200312 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
BAB V PENUTUP	66
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai langkah preventif mengurangi potensi bencana
3. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman dan demokratis
4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Sesuai dengan amanat pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 peran Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, hal ini menuntut kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 15);

31. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 74);
32. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 27).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini adalah untuk memberikan arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan;
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025;
4. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika/ susunan penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan target capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023–2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

3.2 Tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

3.3 Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

3.4 Program dan Kegiatan

Berisikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 12.020.806.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 13.395.760.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 12.872.259.542 atau sebesar 96,09% yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang dikaitkan dengan target capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja disajikan dalam tabel 2.1 berikut : (Tabel TC.29)

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel TC.29)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
Badan Pendapatan Daerah			NA (tahun sebelum periode renstra)						
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEUANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	371,00 %	-	90 %	96,8 %	107,56	91,00 %	187,80	51%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	92,00 Dokumen	-	23 Dokumen	23 Dokumen	100,00	23,00 Dokumen	46,00	50%

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	Dokumen	-	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	2,00	Dokumen	4,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	2,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	2,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	2,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1,00	Dokumen	2,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64,00	Laporan	-	16	Laporan	16	Laporan	100,00	16,00	Laporan	32,00	50%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Laporan	-	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1,00	Laporan	2,00	50%
				-								-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108	Dokumen	-	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	27	Dokumen	31,00	29%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	Orang /bulan	-	33	Orang /bulan	33	Orang /bulan	100,00	35	Orang /bulan	68,00	49%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	-	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	24,00	50%

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	-	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	2,00	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	24,00	50%
				-								-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	8	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	2	Dokumen	3,00	38%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	2,00	50%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	-	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1,00	25%
				-								-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	12	Dokumen	-	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6,00	50%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143	Paket	-	34	Paket	34	Paket	100,00	36	Paket	70,00	49%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	Orang	-	5	Orang	5	Orang	100,00	7	Orang	12,00	46%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	-	10	Orang	10	Orang	100,00	10	Orang	20,00	50%
				-								-	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	16 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	4 Dokumen	9,00	56%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2,00	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8,00	50%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	2 Paket	6,00	75%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	4,00	50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	-	30 Laporan	30 Laporan	100,00	30 Laporan	60,00	50%
			-					-	#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	6 Dokumen	11,00	46%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	-	7 Unit	7 Unit	100,00	2 Unit	9,00	75%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit	-	84 Unit	84 Unit	100,00	50 Unit	134,00	67%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	-	50 Unit	50 Unit	100,00	16 Unit	66,00	103%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00	7 Unit	8,00	29%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	2,00	25%

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1,00	25%
			-					-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	25 Dokumen	28,00	112%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	24,00	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	24,00	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	24,00	50%
			-					-	#DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Dokumen	-	106 Dokumen	106 Dokumen	100,00	4 Dokumen	110,00	688%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2,00	50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	148 Unit	-	24 Unit	24 Unit	100,00	37 Unit	61,00	41%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340 Unit	-	80 Unit	80 Unit	100,00	85 Unit	165,00	49%

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2,00	50%
			-					-	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,5 % 4,50%	-	3,5 %	18,73 %	18,73	4,5 % %	18,78	41722%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah	343,75 %	-	85,25 %	84,66 %	99,31	85,5 %	170,16	50%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4,00	50%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12,00	50%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	12,00	50%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	180 Unit	-	53 Unit	53 Unit	100,00	45 Unit	98,00	54%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	44 Laporan	-	11 Laporan	11 Laporan	100,00	11 Laporan	22,00	50%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4,00	50%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7100 Obyek Pajak	-	1.600 Obyek Pajak	6.274 Obyek Pajak	392,13	1700 Obyek Pajak	7.974,00	112%

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	480000	Dokumen	-	124.000	Dokumen	121.226	Dokumen	97,76	120000	Dokumen	241.226,00	50%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44	Layanan	-	11	Layanan	11	Layanan	100,00	11	Layanan	22,00	50%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24	Dokumen	-	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	6	Dokumen	12,00	50%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	34316	Dokumen	-	8.200	Dokumen	11.423	Dokumen	139,30	8529	Dokumen	19.952,00	58%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	420	Dokumen	-	105	Dokumen	109	Dokumen	103,81	105	Dokumen	214,00	51%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48	Dokumen	-	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	24,00	50%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	24,00	50%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8	Laporan	-	2	Laporan	2	Laporan	100,00	2	Laporan	4,00	50%

Sumber : Data diolah Badan Pendapatan Daerah

Tabel tersebut berisi mengenai hasil evaluasi Renja dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023. Tabel tersebut menjelaskan mengenai review pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1). Perkiraan capaian tersebut nantinya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah 2023-2026. Masih ada tiga tahun dalam periode renstra, yaitu tahun 2024, 2025 dan 2026 dalam masa Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

- Perkiraan Pencapaian Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024 melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.326.970.800,00- dan estimasi capaian kinerja fisik sebesar 100% serta keuangan 95% dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis pencapaian kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah, dapat disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator Kinerja	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2023	2023	2024	2025	2026	2024	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	√	√		15,96%	99,25%	16.08 %	16.51 %	16.93 %	17.29 %	16.51 %	
2	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			√	87,65%	102,82%	A (80)	A (80)	A (81)	A (82)	A (80)	
3	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	√			80,70 Nilai A	100,87%	85.25 %	85.50 %	86.00 %	87.00 %	80%	
4	Indeks Kepuasan Aparatur based on Survey Kepuasan Masyarakat			√	80,46 Nilai skor	100,58%	80 Nilai Skor	81 Nilai Skor	82 Nilai Skor	83 Nilai Skor	81 Nilai Skor	

Sumber : Data diolah Badan Pendapatan Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Bapenda Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16.08 %	15,96%	99,25%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.25 %	87,65%	102,81%	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	A (80)	80,70 Nilai A	100,87%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan masyarakat	80 Nilai Skor	80,46 Nilai skor	100,58%	Sangat Tinggi
Rata-rata						100,88%	Sangat Tinggi

- 1 Tujuan/Sasaran Strategis:**
Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16.08 %	15,96%	99,25%

Sumber: Data diolah

Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,85	15,46	24	16,5	15,96	90,2	108,42	168,19	115,55	99,25

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Badan Pendapatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja s.d. Tahun			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.08 %	16.51 %	16.93 %	17.29 %	15,96			

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa periode Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat baru memasuki Tahun pertama dari periode 2023-2026.

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai target, hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pengoptimalan Potensi PAD dengan optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada di Daerah;
2. Melakukan Koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD pengelola PAD.

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan.

2 Sasaran: 'Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator,
dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.25 %	87,65%	102,82%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Tahun				Capaian Kinerja			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	87,65				102,82			

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Badan Pendapatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja s.d. Tahun			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85,25	85,50	86,00	87,00	87,65			

Sumber: Data diolah

Untuk Tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Renstra Bapenda 2023-2026.

Mewabahnya pandemi Virus Corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia membutuhkan antisipasi dan respons yang komprehensif. Tantangan Organisasi semasa Pandemi Covid-19 adalah tetap menjalankan aktivitas dengan sehati-hati mungkin, dengan mempertimbangan berbagai risiko pekerjaan selama pandemi, juga memperhatikan kondisi masyarakat yang dengan berbagai tantangan harus berjuang menghadapi pandemi dengan segala aturan pemerintah dengan adanya pemberlakuan PPKM berbagai level yang berdampak dalam dunia usaha dan pendapatan daerah.

Bercermin dengan kondisi penerimaan pajak daerah tahun 2020, 2021, dan 2022 peningkatan penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 masih menfokuskan pada penanganan dan pemulihan ekonomi dampak pemdemi *Covid-19*, sedangkan di Tahun 2023 ini kondisi sudah lebih pada kondisi normal, roda perekonomian Masyarakat mulai berputar dan aktivitas ekonomi, wisata sudah berjalan normal. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2023 adalah :

- Pembaruan dan pengintegrasian aplikasi penatausahaan Pajak Daerah dari sebelumnya SIMPEDA, SISMIOP, e-SPPT PBB, dan e-monitoring PBB ke satu aplikasi berbasis website dengan alamat : <https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>.
- Mempermudah pembayaran Pajak Daerah dengan membuka akses pembayaran seluas-luasnya dengan cara host to host dengan Bank-Bank persepsi. Beberapa Bank yang telah launching host to host dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah : Bank Kalteng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPR, dan Bank Marunting Sejahtera. Menyusul berikutnya untuk peningkatan pelayanan pembayaran adalah dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun. Meski demikian, masih terdapat masukan dari Wajib Pajak yang belum

terakomodir dan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuka host to host dengan mitra lainnya.

- c. Mempermudah pelayanan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak terkait pengecekan tagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya melalui aplikasi berbasis playstore dengan nama Sentuh Pajak Kobar.
- d. Mempermudah Wajib Pajak mengingat kewajiban Perpajakannya melalui WhatsApp Blast Bapenda Kobar

Target di tahun 2023 di dalam RPD adalah sebesar 3,50% dan realisasi sebesar 9,05% artinya ada 5,55% melebihi target yang ditetapkan.

Dalam pencapaian indikator sasaran didukung oleh 1(satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 1(satu) kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 15 sub kegiatan. Adapun indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 18,73%. Adapun Indikator kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah Persentase Realisasi Pajak Daerah dengan realisasi 84,66% dan dengan realisasi keuangan Rp. 4.141.360.128,- atau 94,63%.

- 3 Tujuan/Sasaran:** 'Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 3 (tiga) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:
- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra periode sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Realisasi Kinerja s.d. Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	81,08	80,21	83,58	80,15	80,70
			A	A	A	A	A

Sumber : LHE Sakip Bapenda Tahun 2019-2023

Tabel 2.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target dan Capaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	A (80)	A(80,70)	100,87%

Sumber : LHE Sakip Bapenda Tahun 2023

- 4 Tujuan/Sasaran:** 'Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah. Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 4 (empat) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:
- Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan aparatur	80	80,46	100,58%

Sumber: Data diolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat (2023)

Pada tahun 2023 target Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 80 Nilai Indeks Kepuasan Aparatur dengan capaian 80,46 Nilai Indeks Kepuasan Aparatur dan persentase capaian 100,58%. Tujuan dilakukannya survei kepuasan aparatur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pegawai, mengetahui kekurangan dan kelemahan organisasi, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan serta memacu persaingan positif antar bidang dalam upaya peningkatan kinerja pegawai sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Survey dilakukan pada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik pada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan total sebanyak 56 orang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung dan dilakukan selama 5 (lima) hari dengan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Aparatur selama Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan secretariat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan Baik oleh pegawai. Hal ini

terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Aparatur) mendapat nilai 80,46 Dengan nilai interval Baik.

2. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Aparatur menunjukkan nilai unsur tertinggi yang mendapatkan nilai 3,46 dengan Nilai Interval Baik adalah Unsur Kualitas Kewajaran Biaya.
3. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Aparatur menunjukkan nilai unsur terendah dengan kategori baik yaitu unsur Penyediaan Data mendapatkan nilai 3,09 dengan Nilai Interval Baik, unsur Kompetensi Petugas mendapatkan nilai 3,13 dengan Nilai Interval Baik, Unsur Kualitas Sarpras mendapatkan nilai 3,13 dengan Nilai Interval Baik.

Rencana tindak lanjut dilakukan dengan prioritas dimulai dari nilai unsur terendah, sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas layanan penyediaan data sesuai dengan kebutuhan dan target secara maksimal.
- Meningkatkan kompetensi petugas, ketepatan dan kecepatan waktu dalam memberi layanan sesuai SOP.
- Pelayanan ditingkatkan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada menyesuaikan kebutuhan Pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam pencapaian Indeks Kepuasan Aparatur didukung oleh 1(satu) program, 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan penunjang rutinitas kedinasan. Adapun indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase capaian penunjang perangkat daerah dengan realisasi sebesar 99,06%. Kegiatan dan sub kegiatan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan, dan penatausahaan kantor berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Pemetaan permasalahan yang menjadi pokok masalah secara makro sebagai berikut :

Tabel 2.13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pembangunan daerah memerlukan pendanaan yang lebih mandiri	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal- Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan- Database pajak daerah yang masih perlu penyesuaian dan update- Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan masih belum optimal

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

1. Sebagai Kota yang memiliki Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat yang memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka
2. Berkembangnya kunjungan wisata ke Kota Pangkalan Bun memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah :

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.

3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Isu strategis dalam pelayanan dan perencanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Belum optimalnya sistem informasi, aplikasi pengolahan data dan proyeksi riil potensi pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah
4. Kurangnya kesadaran pemilik Hotel, tempat hiburan dan Restoran dalam membayar pajak

2.4 *REVIEW* TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review program dan kegiatan terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui jika terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan usulan Renja Perangkat Daerah baik dari Program dan Kegiatan maupun besaran pagu dananya.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah dalam rancangan awal RKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 – 2026. Sedangkan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu anggaran hasil analisis kebutuhan, disusun kembali menyesuaikan dengan besaran alokasi pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah. Sehingga berdasarkan hasil *review* program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 yang dibandingkan dengan analisis kebutuhan, dapat disampaikan bahwa terdapat perbedaan jumlah rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, besaran alokasi pagu anggaran serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.

Perbedaan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah dilatarbelakangi oleh :

1. Penyesuaian besaran pagu anggaran per sub kegiatan berdasarkan kebutuhan dan besaran standarisasi harga barang dan jasa.
2. Penyesuaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang dipengaruhi oleh besaran alokasi pagu anggaran.

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Adapun *review* terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dituangkan dalam tabel berikut :

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.14 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Barat

**Tabel T-C 31. RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2025**

No	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pendapatan Daerah				14.326.970.800	Badan Pendapatan Daerah				14.326.970.800	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				14.326.970.800	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				14.326.970.800	
	KEUANGAN				14.326.970.800	KEUANGAN				14.326.970.800	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kotawarin gin Barat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	91%	10.262.364.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kab. Kotawarin gin Barat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	91%	10.262.364.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	60.816.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	60.816.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.972.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.972.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.654.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.654.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	16 Laporan	2.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	16 Laporan	2.160.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.025.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.025.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.816.650.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.816.650.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.576.226.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.576.226.500	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145.411.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145.411.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	92.373.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	92.373.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.640.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.500.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Dokumen	216.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Dokumen	216.900.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	21.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	21.900.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	75.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	120.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen	530.150.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen	530.150.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.150.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.150.500	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

		Selatan, Sidorejo					Selatan, Sidorejo				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotawarin gin Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	270.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotawarin gin Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	270.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	1.496.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	1.496.400.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	55.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	55.500.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	199.800.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	199.800.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	675.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	675.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	277.500.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	277.500.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	111.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	111.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	177.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	177.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	481.993.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	481.993.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.742.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.742.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.251.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.251.200	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	652.954.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	652.954.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.356.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.356.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	227.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	227.160.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	12.210.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	12.210.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	87.738.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	87.738.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	237.540.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	237.540.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

		Selatan, Sidorejo	Dipelihara/Direh abilitasi				Selatan, Sidorejo	Dipelihara/Direha bilitasi			
	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	49.950.000	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	49.950.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Kotawarin gin Barat	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,5 %	4.064.605.900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Kotawarin gin Barat	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,5 %	4.064.605.900	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat	Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah	6 Laporan 86.00 %	4.064.605.900	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat	Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah	6 Laporan 86.00 %	4.064.605.900	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	24.500.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	24.500.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	150.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	150.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	117.800.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawarin gin Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	117.800.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45 Unit	320.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45 Unit	320.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	226.200.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	226.200.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	167.584.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	167.584.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1700 Obyek Pajak	811.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1700 Obyek Pajak	811.000.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	120000 Dokumen	363.694.400	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	120000 Dokumen	363.694.400	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	62.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	62.000.000	

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	107.050.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	107.050.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8729 Dokumen	800.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8729 Dokumen	800.000.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	105 Dokumen	134.016.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	105 Dokumen	134.016.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	221.421.500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	221.421.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16.740.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16.740.000	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	542.600.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	542.600.000	
					14.326.970.800					14.326.970.800	

Sumber : Data diolah Badan Pendapatan Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan SKPD bisa diusulkan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum SKPD maupun forum lainnya sebelum penyusunan rencana kerja.

Program dan kegiatan tahun 2025 secara spesifik **tidak ada** program/kegiatan usulan masyarakat yang terangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel T-C.32)

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Ada Usulan Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi dan sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

No.	Prioritas	Sasaran Daerah (RPD)	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Penguatan reformasi birokrasi sesuai dengan tematik grand desain Reformasi Birokrasi Nasional	[SASARAN] Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	Peningkatan realisasi PAD	1. Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2.		[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	2. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	2. Indeks Kepuasan Aparatur based on Survey Kepuasan Masyarakat

Prioritas Pembangunan yang memuat indikator SKPD adalah prioritas Pembangunan nomor 5.

1. Pengembangan produk-produk unggulan industri lokal disertai penguatan promosi, kerjasama dan perluasan pasar.
2. Pengembangan infrastruktur digital dan ekonomi strategis dalam meunjang green ekonomi.
3. Pemenuhan dan peningkatan kuantitas pendidikan dan kesehatan yang merata.
4. Penguatan keberdayaan perempuan, tokoh masyarakat dan swasta dalam partisipasi Pembangunan.
5. Penguatan reformasi birokrasi sesuai dengan tematik grand desain RB Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, arah kebijakan serta strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Guna menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sesuai tugas Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada :

1. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan :
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya, secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian sasaran 3 “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat” yang dilakukan

melalui program prioritas ke (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.

2. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik :

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online. Adapun sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang dilakukan melalui Program Prioritas (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan indikator Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

3.2 TUJUAN

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis.
4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Masuk dalam Tujuan ke IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima .

Gambar 4.1 Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah



Tabel 3.2 Tujuan Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.08 %	16.51 %	16.93 %	17.29 %	17.29 %
2.	[TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (80)	A (81)	A (82)	A (82)

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

3.3 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu tahunan untuk mencapai objektifitas tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Badan Pendapatan Daerah menjabarkannya dalam 2 (dua) sasaran meliputi :

Tabel 3.3 Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85.25 %	85.50 %	86.00 %	87.00 %	87.00 %
2.	[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur based on Survey Kepuasan Masyarakat	80 Nilai Skor	81 Nilai Skor	82 Nilai Skor	83 Nilai Skor	83 Nilai Skor

Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Indeks Kepuasan Aparatur

**Tabel 3.4 Definisi Operasional Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	Rumus/Formulasi/ Penjelasan	Satuan
	URUSAN : KEUANGAN			
A	[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Realisasi PAD	Realisasi PAD Tahun n - Realisasi PAD tahun n-1 / Realisasi PAD tahun n-1 x 100% Merupakan Nilai dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ini dikurangi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dibagi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. PAD yang dimaksud merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Rincian kode rekening dalam APBD	%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Formulasi = (Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100% Merupakan Indikator yang terdapat Permendagri 86 Tahun 2017 dan merupakan indikator yang diukur dalam LPPD Tahunan. Pendapatan Asli Daerah	
	[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Formulasi = (Realisasi PAD / Target) x 100%. Merupakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	%
	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	Formulasi = ((Realisasi Pajak Tahun berjalan - Realisasi Pajak Tahun lalu))/realisasi pajak tahun lalu x 100%	%
	[KEGIATAN] Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	(Realisasi Pajak Tahun berjalan/ Target Pajak Tahun berjalan) x 100%	%
		Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan	Laporan Realiasi elektronifikasi	Laporan

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

NON URUSAN				
B	[TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP Merupakan Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dikeluarkan oleh tim penilai SAKIP yaitu Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.	Nilai SAKIP
	[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Terhadap Masyarakat atas pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Nilai /Skor
	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Nilai Rerata Jumlah capaian kinerja kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah /8 dikali 100%	%
	[KEGIATAN1] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan dibagi jumlah administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	Dokumen
	[KEGIATAN2] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan dibagi jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	Dokumen
	[KEGIATAN3] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	Dokumen

[KEGIATAN4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Total keseluruhan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen
[KEGIATAN5] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan dalam DPA x 100%	Dokumen
[KEGIATAN6] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan untuk diadakan dalam DPA x 100%	Dokumen
[KEGIATAN7] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dibagi Jumlah Dokumen/Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi x 100%	Dokumen
[KEGIATAN8] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun x 100%	Dokumen

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah guna mencapai sasaran, dan dengan adanya program dan kegiatan ini diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Sukeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut:

 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan sub kegiatan sebanyak 15 sebagai berikut:

 - 2.1.1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - 2.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 2.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 2.1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2.1.5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 2.1.6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 2.1.7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 2.1.8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 2.1.9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

- 2.1.10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 2.1.11. Penagihan Pajak Daerah
- 2.1.12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 2.1.13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 2.1.14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2.1.15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dirancang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki dua program yaitu :

Tabel 4.1 Sasaran dan program/kegiatan dan sub kegiatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Penagihan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 direncanakan sesuai dengan perencanaan teknokratik yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026, Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun matriks rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 14.326.970.800,- bersumber dari APBD akan disajikan sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut:

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel TC.33)

No	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Pendapatan Daerah				14.326.970.800				14.309.963.873
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				14.326.970.800				14.309.963.873
	KEUANGAN				14.326.970.800				14.309.963.873
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kotawaringin Barat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	91%	10.262.364.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	91%	9.996.320.473
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	60.816.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26 Dokumen	60.816.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.972.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	43.972.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.577.500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.654.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.654.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.850.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	2.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	2.160.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.025.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.025.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.816.650.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.999.244.073
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.576.226.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.758.820.073

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145.411.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	145.411.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	92.373.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	92.373.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.640.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Dokumen	216.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Dokumen	216.900.000

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

						ALOKASI UMUM			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	21.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	21.900.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	75.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	120.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen	530.150.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen	530.150.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.000.000

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

						ALOKASI UMUM			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.150.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.150.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	270.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	270.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	1.496.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	1.080.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	55.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	30.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	199.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	150.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	675.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	200.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	277.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300.000.000

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

						ALOKASI UMUM			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	111.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	177.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	481.993.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	481.993.900
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.742.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.742.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.251.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.251.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	652.954.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	620.716.000

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

						ALOKASI UMUM			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.356.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.556.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	227.160.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	227.160.000
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	12.210.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	87.738.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	90.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	237.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Kotawaringin Barat	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,5 %	4.064.605.900	PAJAK DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,5 %	4.313.643.400

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah	6 Laporan 86.00 %	4.064.605.900	PAJAK DAERAH	Jumlah elektronifikasi per jenis pajak yang dilaksanakan Persentase Realisasi Pajak Daerah	8 Laporan 86.00 %	4.313.643.400
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	24.500.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	24.500.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	150.000.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	150.000.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	117.800.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	120.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45 Unit	320.000.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	45 Unit	320.000.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	226.200.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	227.389.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	167.584.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	167.584.000
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1700 Obyek Pajak	811.000.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1700 Obyek Pajak	1.028.670.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	120000 Dokumen	363.694.400	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	126000 Dokumen	398.122.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	62.000.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	27.572.400

Ranhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	107.050.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	107.050.000
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8729 Dokumen	800.000.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8729 Dokumen	800.000.000
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	105 Dokumen	134.016.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	105 Dokumen	134.016.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	221.421.500	PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	225.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16.740.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	16.740.000
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	542.600.000	PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	567.000.000
	JUMLAH				14.326.970.800				14.309.963.873

Sumber Data : Data diolah Badan Pendapatan Daerah

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025. Dalam rangka menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum dan Badan Pendapatan Daerah secara khusus, maka Renja Badan Pendapatan Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja Rancangan akhir tahun 2025
2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah. Harapan kami semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 nantinya dapat memberikan manfaat agar tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dapat terwujud.

Pangkalan Bun, Agustus 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



M. NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP

Pembina Tk. I
NIP. 19770422 200312 1 004

LAMPIRAN